



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD tahun 2025 mempunyai sasaran dan prioritas pembangunan yang semakin fokus dan terarah sehingga diharapkan dalam RKPD 2025 ini mempunyai kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rangka sebagai dokumen pelaksana RPJMD, maka sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan dalam RPJMD pada arah pembangunan tahun 2025. Hal ini dilakukan agar sasaran pembangunan RPJMD dapat tercapai melalui perencanaan tahunan ini. Sehingga secara bertahap visi, misi, tujuan dan sasaran selama 5 tahun dalam RPJMD akan tercapai melalui pencapaian RKPD.

Prioritas pembangunan merupakan fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis yang melandasi atau berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Bupati dalam RPJMD dari tahun ke tahun. Sehingga prioritas pembangunan RKPD 2025 mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman yang harus diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD.

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 dalam mencapai visi dan misi Bupati melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;



2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan nasional;
3. Memedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2025;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2025; serta
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi

Penelaahan dokumen lainnya terutama dokumen perencanaan di atasnya di maksudkan agar terjadi keselarasan perencanaan pusat dan daerah. Pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional

A. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025

Tema Pembangunan RKP Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan tersebut untuk mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045 yang difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. RKP 2025 ini diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Selanjutnya, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. sesuai dengan tema tersebut ditetapkan 17 (tujuh belas) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2025 yakni (1) Kesehatan untuk Semua, (2)



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pendidikan Berkualitas yang Merata, (3) Perlindungan Sosial yang Adaptif, (4) Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, (5) Penerapan ekonomi hijau, (6) Transformasi digital, (7) Integrasi ekonomi domestik dan global, (8) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, (9) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, (10) keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif, (11) Stabilitas ekonomi makro daerah, (12) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan, (13) Beragama mashlahat dan berkebudayaan maju, (14) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, (15) Lingkungan hidup berkualitas, (16) Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, dan (17) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

B. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat periode Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025 merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”** yang selanjutnya dijabarkan melalui 8 Misi Pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial;
2. *Transformasi Ekonomi*;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Dukungan Sarana Prasarana Berkualitas yang Ramah lingkungan;
8. Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Indonesia Emas.

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD diperlukan arah kebijakan guna efektivitas dan efisiensi



pencapaian pembangunan selama lima tahun. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026. Sasaran dan prioritas dirumuskan sesuai dengan visi dan misi RPJMD dengan memerhatikan kebijakan pemerintah provinsi (Kalimantan Barat) dan nasional. Sebagaimana telah dijelaskan, RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun Keempat dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026. Dengan demikian, sasaran RPJMD untuk target pencapaian tahun 2025 menjadi rujukan penting sebagai indikasi kinerja yang harus dicapai dalam RKPD tahun 2025, sebagai berikut.

1) Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya

Agar tujuan Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- ▢ Meningkatnya kondusivitas wilayah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Tindak Lanjut dan Penyelesaian Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pencapaian 100 % pada akhir tahun 2026.
- ▢ Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat beragama, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kerukunan antar Umat Beragama dengan pencapaian sebesar 88 pada akhir Tahun 2026.
- ▢ Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Resiko Bencana dengan pencapaian sebesar 124 pada akhir tahun 2026.
- ▢ Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan pencapaian sebesar 80 pada akhir tahun 2026.



2) Tujuan 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Agar tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Unggulan Daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan LPE Kategori Industri Pengolahan sebesar 1,50 %; LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,20 % ; dan LPE Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Sebesar 5,98 % pada tahun 2026.

3) Tujuan 3: Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri

Agar tujuan Mewujudkan Meningkatkan jumlah desa mandiri tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Katagori Mandiri, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Jumlah Desa Mandiri dengan pencapaian 67 Desa Mandiri pada akhir tahun 2026.

4) Tujuan 4: Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka

Guna Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya Kesejahteraan Sosial, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 39,12 % pada akhir tahun 2026;
- Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih sebesar 20,82 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya investasi daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Nilai Realisasi Investasi sebesar 620,20 Milyar pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Mikro sebesar 93,72 % dan Persentase Koperasi Aktif sebesar 51,36 % pada akhir tahun 2026.

5) Tujuan 5: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Guna Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,05 pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase RDTR sebesar 65,22 % pada akhir tahun 2026

6) Tujuan 6: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Guna Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya Harapan Lama Sekolah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,04 Tahun pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Rata - Rata Lama Sekolah sebesar 8,54 Tahun pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Angka Harapan Hidup sebesar 73,51 Tahun pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Pengeluaran Perkapita sebesar 7,963 Juta pada akhir tahun 2026.

7) Tujuan 7: Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Guna Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Nilai SAKIP Predikat A pada tahun 2026.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Score 81,00 pada tahun 2026.



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

- Optimalnya pengelolaan keuangan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Opini BPK Predikat WTP pada tahun 2026.
- Meningkatnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Predikat SPBE dengan Predikat Baik pada tahun 2026.
- Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Predikat KIP dengan Predikat Informatif pada tahun 2026.
- Meningkatnya Maturitas SPIP, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Maturitas SPIP dengan Level 3 pada tahun 2026.
- Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan professional, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Profesional ASN dengan nilai 50 Pada Tahun 2026.

8) Tujuan 8: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah

Guna mencapai tujuan Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah tersebut maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah

- Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap sebesar 79 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap sebesar 69 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum sebesar 87,03 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 82,64 % pada akhir tahun 2026.



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

- Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik sebesar 86,66 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani sebesar 69,05 % pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Rasio konektivitas Kabupaten sebesar 80,70 % pada akhir tahun 2026.

9) Tujuan 9: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Guna mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya SDM berkualitas dan berdaya saing, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM sebesar 85 pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya SDM berkualitas dan mutu fasyankes dasar dan rujukan, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM dan Sarana dan Prasarana sebesar 86 pada akhir tahun 2026.

Berikut tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025.

Tabel 4.1
Tujuan dan Inidikator Tujuan (Makro) Pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	2025
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL					
Misi 1					
Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan					
1.1	Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya	Indeks Rasa Aman	Indeks	76,31	97



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	2025	
	1.1.1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100
	1.1.2	Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76	86
	1.1.3	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	118,9
	1.1.4	Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	78
Misi 2						
Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi						
2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,43	4
	2.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	1,40
			Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	3,4
			Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		4,98	5,78
			LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,9	4,53
2.2	Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri		Persentase Desa Mandiri	%	13,31	21,98
	2.2.1	Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Katagori Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	61
2.3	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka		Tingkat Kemiskinan	%	8,33	7,33
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	3,17
	2.3.1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	35,43	38,45
	2.3.2	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	19,99
	2.3.3	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	MILYAR	400	424,48
	2.3.4	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing	Persentase Usaha Mikro	%	92,56	93,52
			Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	48,25
2.4	Meningkatkan Pengelolaan lingkungan hidup		Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PREDIKAT	Baik	Baik



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	2025	
	2.4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	74,96
	2.4.2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase RDTR	%	4,35	52,17
Misi 3:						
Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing						
3.1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	-	65,69	68,66	
	3.1.1	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,92
	3.1.2	Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	8,39
	3.1.3	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,35
	3.1.4	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Thn	7,162	7.842
Misi 4:						
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas						
4.1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	PREDIKAT	CC	B	
	4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	PREDIKAT	B	BB
	4.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	SCORE	80,3	80,9
	4.1.3	Optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
	4.1.4	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Predikat SPBE	Predikat	BAIK	BAIK
	4.1.5	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif
	4.1.6	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level	3	3
	4.1.7	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	49,50
4.2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	72,22	80,92	
	4.2.1	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	%	64	76



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	2025	
	4.2.2	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	%	59	67
	4.2.3	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	78,76	84,2
	4.2.4	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	74,46	79,83
	4.2.5	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	83,66
	4.2.6	Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	%	37,55	62,75
	4.2.7	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten	Angka	56,2	75,80
Misi 5:						
Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat						
5.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	-	0	79,50
	5.1.1	Meningkatnya SDM berkualitas dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM dan Sarana dan Prasarana	SCORE	75	84

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

NO	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025
1	Indeks Rasa Aman	Indeks	76,31	97
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100
3	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76	86
4	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	118,9
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	78
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,43	4



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025
7	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	1,40
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	3,4
9	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		4,98	5,78
10	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,90	4,53
11	Persentase Desa Mandiri	%	13,31	21,94
12	Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	61
13	Tingkat Kemiskinan	%	8,33	7,33
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	3,17
15	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	35,43	38,45
16	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	19,99
17	Nilai Realisasi Investasi	MILYAR	400	424,48
18	Persentase Usaha Mikro	%	92,56	93,52
19	Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	48,25
20	Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PREDIKAT	Baik	Baik
21	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	74,96
22	Persentase RDTR	%	4,35	52,17
23	Indeks Pembangunan Manusia	-	65,69	68,66
24	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,92
25	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	8,39
26	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,35
27	Pengeluaran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Thn	7,162	7.842
28	Indeks Reformasi Birokrasi	PREDIKAT	CC	B
29	Nilai SAKIP	PREDIKAT	B	BB
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	SCORE	80,3	80,9
31	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
32	Predikat SPBE	Predikat	BAIK	BAIK
33	Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif
34	Level Maturitas SPIP	Level	3	3
35	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	49,50
36	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	72,22	80,92
37	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	%	64	76
38	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	%	59	67
39	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	78,76	84,2
40	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	74,46	79,83
41	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	83,66
42	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	%	37,55	62,75
43	Rasio konektivitas Kabupaten	Angka	56,20	75,80
44	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	0,00	79,50



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET
				2025
terhadap Layanan Kesehatan				
45	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM dan Sarana dan Prasarana	SCORE		84

4.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

“Terwujudnya produktivitas dan kualitas hidup masyarakat kapuas Hulu yang harmonis dalam toleransi kerukunan beragama, budaya, dan keamanan” Tema tersebut merupakan tema pembangunan di tahun 2025 atau tahun keempat pembangunan berdasarkan RPJMD kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026. Setelah di tahun sebelumnya dilakukan Pengembangan kapasitas desa menuju pemerataan kesejahteraan masyarakat, di tahun keempat ini diharapkan masyarakat Kapuas Hulu semakin produktif dan memiliki hidup dengan aman dan damai. Hidup yang aman dan damai ditandai dengan hidup berdampingan antar masyarakat walaupun berbeda agama, suku, ras, dan etnik. Seperti diketahui masyarakat di Kapuas Hulu memiliki keberagaman dikarenakan Kapuas Hulu merupakan perbatasan dengan Negara Malaysia sehingga banyak pendatang di Kapuas Hulu.

Sasaran, Prioritas pembangunan dan Program Prioritas Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran prioritas :

NO	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	
				2024	2025
1	Indeks Rasa Aman	Indeks	76,31	96	97
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100
3	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks	76	83	86
4	Indeks Resiko Bencana	Indeks	129,23	121,5	118,9
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	75	78
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,43	3	4
7	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-0,65	1,30	1,40
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-10,01	2,6	3,4
9	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		4,98	5,58	5,78
10	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	-12,90	3,24	4,53
11	Persentase Desa Mandiri	%	13,31	19,78	21,94
12	Jumlah Desa Mandiri	Desa	37	55	61
13	Tingkat Kemiskinan	%	8,33	7,58	7,33



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	
				2024	2025
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,02	3,34	3,17
15	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	35,43	37,68	38,45
16	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	%	5,14	17,63	19,99
17	Nilai Realisasi Investasi	MILYAR	400	420,28	424,48
18	Persentase Usaha Mikro	%	92,56	93,32	93,52
19	Persentase Koperasi Aktif	%	37,35	44,75	48,25
20	Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PREDIKAT	Baik	Baik	Baik
21	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,17	74,87	74,96
22	Persentase RDTR	%	4,35	39,13	52,17
23	Indeks Pembangunan Manusia	-	65,69	68,15	68,66
24	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,05	12,79	12,92
25	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,52	8,23	8,39
26	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,18	73,35
27	Pengeluaran Perkapita	000 Rp/ Kapita/Thn	7,162	7.722	7.842
28	Indeks Reformasi Birokrasi	PREDIKAT	CC	B	B
29	Nilai SAKIP	PREDIKAT	B	BB	BB
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	SCORE	80,3	80,8	80,9
31	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP
32	Predikat SPBE	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK
33	Predikat KIP	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif
34	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3
35	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	48,19	49,00	49,50
36	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	72,22	78,66	80,92
37	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	%	64	73	76
38	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	%	59	65	67
39	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	78,76	82,58	84,2
40	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	74,46	78,40	79,83
41	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	71,66	80,66	83,66
42	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	%	37,55	56,45	62,75
43	Rasio konektivitas Kabupaten	Angka	56,20	70,90	75,80
44	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	-	0,00	77	79,50
45	Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM, Sarana dan Prasarana	SCORE	75	82	84

Prioritas Pembangunan :

1. Peningkatan kondusivitas wilayah;
2. Peningkatan Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat Beragama;
3. Peningkatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana;
4. Peningkatan nilai-nilai luhur budaya daerah.



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas :

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMBIH					
Misi 1:					
Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan					
Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya					
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Peningkatan kualitas masyarakat yang religius dan toleran	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan, Ketertiban dan Toleransi antar Sesama Umat Beragama	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	SATPOLPP
2	Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat Beragama		2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	KESRA	
3	Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Peningkatan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana	3. Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD
4	Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah	Melestarikan Kearifan lokal dan Budaya	Mewujudkan kehidupan beragama, kearifan lokal, pelestarian dan pementapan nilai-nilai budaya, memperkuat jaringan pengamanan sosial, peningkatan pembinaan organisasi keagamaan, kemasyarakatan dan kepemudaan, peningkatan kelembagaan adat.	5. Program Pengembangan Kebudayaan, 6. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, 7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DISPENDIKBUD KESRA DISPORAPAR
Misi 2:					
Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi					
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan					
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola	Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa, 2. Program Pengembangan	DPMD DKUKMP



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.	industri kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pasar tradisional, pariwisata berbasis potensi lokal, tenaga kerja bersertifikat.	UMKM Program 3. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program 4. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DISNAKERINTRANS DKUKMP
		Pembinaan terhadap koperasi, pelaku usaha mikro, industri kecil dan menengah, memberi bantuan modal dan kemudahan dalam dunia usaha.	5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, 6. Program Pengembangan Umkm	DKUKMP DKUKMP
		Peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi daerah dan pasca Pandemi COVID-19.	7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKESPPKB
		Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna terhadap proses produksi komoditas unggulan daerah.	8. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, 9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISPANGAN DISKAN
		Optimalisasi ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi sektor pertanian dan perikanan.	10. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, 11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISPANGAN DISKAN
		Mendorong kajian dan legalitas tanaman kratom.	12. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA
		Peningkatan sarana, prasarana dan pusat pelatihan, pembinaan di sektor perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan, serta bantuan bibit dan benih.	13. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, 14. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, 15. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 16. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISPANGAN DISPANGAN DISKAN DISPANGAN
		Gerakan masyarakat menanam tanaman	17. Program Penyediaan Dan	DISPANGAN



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			produktif.	Pengembangan Sarana Pertanian, 18. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DISPANGAN
		Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan ikan olahan serta membangun sistem logistik ikan berbasis sistem rantai dingin	Meningkatkan produksi perikanan tangkap yang diarahkan kepada peningkatan produksi budidaya sistem CBF	19. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DISKAN
			Meningkatkan produksi perikanan budidaya yang diarahkan kepada kemampuan pokdakan untuk memproduksi pakan alami dan bibit secara mandiri	20. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISKAN
			Diarahkan kepada kawasan - kawasan yang potensial sebagai sumber daya ikan yang telah memiliki jaringan jalan yang terkoneksi kepada pusat-pusat pemasaran	21. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DISKAN
		Pengembangan pariwisata budaya dan pariwisata alam berbasis Lingkungan	Mengembangkan Kawasan Desa wisata, kebudayaan, pariwisata alam, promosi pariwisata, melibatkan masyarakat lokal.	22. Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	DISPORAPAR
Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri					
6	Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Katagori Mandiri	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa	Percepatan peningkatan status IDM	23. Program Penataan Desa, 24. Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMD DPMD



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.			
Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka					
7	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas hidup fakir miskin dan PMKS lainnya	Optimalisasi sosial safety Net (jaringan Pengaman Sosial), meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan perikanan, pemberian akses permodalan dan pemasaran, mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi desa.	25. Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, 26. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, 27. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 28. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, 29. Program Pengembangan Umkm	DINSOS PPPA DISPANGAN DISPANGAN DKUP DKUP
			Perlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan dan bidang usaha. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku, penguatan informasi Keluarga Berencana dan Konseling untuk kelompok muda, perbaikan sistem manajemen Keluarga Berencana (data, informasi). Peningkatan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.	30. Program Perlindungan Perempuan, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, 31. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), 32. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	DINSOS PPPA DINKES PPKB DINKES PPKB
			Penguatan kapasitas kelembagaan, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) serta	33. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DINSOS PPPA



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Pelayanan Perempuan Dan Anak		
			Perlindungan Ibu dan Anak, peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, pelatihan, permodalan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial. Penguatan organisasi perempuan dari semua tingkatan dari hulu ke hilir.	34. Program Perlindungan Perempuan, Program Pemberdayaan Sosial, 35. Program Rehabilitasi Sosial, 36. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), 37. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	DINSOS PPPA DINSOS PPPA DINKES PPKB
8	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	Pendayagunaan Tenaga Kerja	Penguatan Kerjasama Lintas Instansi terkait Pelatihan dan Kesempatan Kerja	38. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
			Peningkatan kualitas tenaga kerja yang bersertifikasi dan terampil	39. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
9	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan kualitas iklim investasi daerah	Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah	40. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Mendorong investasi masuk ke dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penyebaran investasi yang berkualitas dan berkeadilan, menyiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten sesuai kebutuhan industri, optimalisasi infrastruktur.	41. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, 42. Program Promosi Penanaman Modal, 43. Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP
10	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri, produktif dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas koperasi	Pembinaan Koperasi	44. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam,	DPMPTSP
		Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembinaan Usaha Mikro	45. Program Pengembangan UMKM	DKUP
Meningkatkan pengelolaan					



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
lingkungan hidup					
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam aktivitas perekonomian daerah	Peningkatan peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	46. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH	DLH
		Fasilitasi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah			
		Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan daerah	Mempercepat proses akreditasi laboratorium lingkungan daerah	47. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan dan persampahan , serta perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Taman Kota	Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran (institusi dan non-institusi), penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, mengoptimalkan pengendalian pencemaran (baku mutu) dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan, drainase dan persampahan. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang representatif.	48. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan kebersihan dan persampahan	49. Program Pengelolaan Persampahan	DLH
		Pengembangan Ruang terbuka hijau (RTH) melalui hutan/taman kota	50. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLH	
		Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan	51. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH	



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			hidup		
			Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	52. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH	DLH
12	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Penyediaan RDTR	Perencanaan, Implementasi RDTR dan tersedianya ruang terbuka hijau dan taman kota di Kabupaten Kapuas Hulu.	53. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	DLH
Misi 3:					
Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing					
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia					
13	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan	Pembangunan asrama, pendidikan dasar gratis, bantuan biaya pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa, Pembangunan dan rehabilitasi untuk ruang kelas dan rumah Dinas Tenaga Pendidik (Tendik) serta Regrouping sekolah dasar.	1. Program Pengelolaan Pendidikan	DISPENDIKBUD
14	Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah				
15	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES PPKB
16	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Optimalisasi Pengelolaan SDA dan SDM	Pemberdayaan dan pengembangan SDA dan SDM	3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	KESRA
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui Program Padat Karya tunai.	4. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	KESRA
Misi 4:					
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas					
Meningkatkan kualitas					



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
pelaksanaan Reformasi Birokrasi					
17	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana	Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	KESRA
			Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif.	2. Program Perekonomian Dan Pembangunan, 3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA BAPPEDA
			Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.	4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, 5. Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM BKPSDM
			Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	6. Program Penyelenggaraan Pengawasan, 7. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSPEKTORAT INSPEKTORAT
			Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	8. Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
18	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan sistem pelayanan publik	Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan e-	9. Program Aplikasi Informatika	DISKOMINFOTIK



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			<i>government</i>		
			Peningkatan pelayanan internal Perangkat Daerah	10. Program Aplikasi Informatika	DISKOMINFOTIK
			Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	11. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	DISKOMINFOTIK
			Membangun Fasilitas pelayanan publik, rumah singgah dan sarana olah raga.	12. Program Penataan Bangunan Gedung	
			Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	13. Program Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL
				14. Program Pencatatan Sipil	DUKCAPIL
19	Optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi tata kelola keuangan daerah dan penertiban aset daerah	15. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
		Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	16. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA
20	Meningkatnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Peningkatan Sitem Pelaksanaan SPBE	Optimalisasi Sitem Pelaksanaan SPBE	17. Program Aplikasi Informatika	DISKOMINFOTIK
21	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	DISKOMINFOTIK
22	Meningkatnya Maturitas SPIP	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan	19. Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
23	Meningkatnya Sumber Daya	Peningkatan profesionalitas	Peningkatan jenjang pendidikan ASN	20. Program Kepegawaian	BKPSDM



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.	Akses pengembangan kompetensi bagi ASN Peningkatan disiplin ASN Peningkatan kinerja ASN yang terukur dan akuntabel Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	Daerah, Program pengembangan Sumber Daya Manusia	
Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah					
24	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Dasar dan	Meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi serta	21. Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
25	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa	Membangun Kapuas Hulu dari pinggiran	Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana utilitas daerah	22. Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
26	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak			23. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR
27	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak			24. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PUPR
28	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi			25. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	PUPR
29	Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman			26. Program Pengembangan Perumahan, Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	PUPR
30	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten			27. Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
Misi 5: Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi					



BAB IV – Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
masyarakat					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat					
31	Meningkatnya SDM berkualitas dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar	Percepatan penanganan dan pemulihan Pandemi Covid-19	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES PPKB
			Pembangunan rumah singgah masyarakat miskin yang sakit dan Ibu hamil	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES PPKB
			Meningkatkan kapasitas tenaga Kesehatan yang berorientasi pada pencapaian standar pelayanan minimal	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES PPKB
			Peningkatan Sarana dan Prasarana serta akses dan mutu kefarmasian	4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan 5. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	DINKES PPKB DINKES PPKB

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD 2025 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan secara sinergis terhadap penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah diturunkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Kapuas Hulu 2025 harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2025, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam

penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Kapuas Hulu. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 akan menyajikan daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/Perangkat Daerah penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian;

Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

Mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) di atas berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 terlampir pada lampiran 5.1

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KAPUAS HULU
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						645.167.214.400,00							27.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						641.764.878.900,00							27.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						641.764.878.900,00							27.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	548.617.581.332,00						-	0,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	551.846.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	10.450.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	8.027.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				3 Dokumen	8.273.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				3 Dokumen	17.658.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	14.130.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	16.560.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				10 Laporan	476.748.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	543.498.680.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				3000 Orang/bulan	542.736.395.400,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANG AN PROFESI GURU, DAK NON FISIK-TUN JANGAN GURU ASN DAERAH-T AMBAHAN PENGHASILAN GURU, DAK NON FISIK-TUN JANGAN GURU ASN DAERAH-T UNJANGAN KHUSUS GURU	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	703.359.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				12 Dokumen	12.135.600,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				5 Laporan	12.426.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				5 Dokumen	13.751.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	11.539.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				12 Dokumen	9.073.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	139.553.100,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Laporan	49.880.400,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	81.953.800,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	7.718.900,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	544.068.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	71.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	115.378.800,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	115.271.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				100 Orang	30.607.600,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				100 Orang	39.880.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				15 Orang	171.931.400,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.816.766.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12.598.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	62.100.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	67.854.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	120.861.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	56.400.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	1.176.540.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	70.413.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	105.517.260,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				5 Unit	27.889.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	36.670.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					20 Unit	40.958.260,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5 Unit	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3 Unit	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.244.210.172,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	25.660.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	400.296.172,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	818.254.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	716.940.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					3 Unit	526.530.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN